

Partisipasi Politik Pemilih Perempuan di Sumatera Barat Berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan

Salsabila¹, Nurmina²

Universitas Negeri Padang
e-mail: repelitasalsabilazulkarnain@outlook.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan dalam pemilihan gubernur ditinjau dari usia dan tingkat pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berjenis komparatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 180 pemilih perempuan di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil dengan perhitungan anava dua jalur diperoleh partisipasi politik berdasarkan usia dengan signifikansi 0,026 ($p < 0,05$), partisipasi politik berdasarkan tingkat pendidikan dengan signifikansi 0,23 ($p > 0,05$) dan uji interaksi antara usia dengan pendidikan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan usia namun tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan berdasarkan tingkat pendidikan. Selain itu, terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan perempuan dalam partisipasi politik.

Kata kunci: *Partisipasi Politik, Usia, Pendidikan, Pemilih Perempuan*

Abstract

This study aims to examine the differences in political participation of female voters in the gubernatorial election in terms of age and education level. The research method used was of the comparative quantitative type. The subjects in this study were 180 female voters in West Sumatra. Based on the results with the two-way ANOVA calculation, political participation based on age was obtained with a significance of 0.026 ($p < 0.05$), political participation based on education level with a significance of 0.23 ($p > 0.05$) and the interaction test between age and education obtained a significance value. of 0.002 ($p < 0.05$). These results indicate that there are differences in political participation of female voters based on age but there is no difference in political participation of female voters based on education level. In addition, there is an interaction between the age category and education in women's participation in political participation.

Keywords: *Political participation, age, education, female voters*

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pesta demokrasi selama tiga tahun berturut-turut. Pada tanggal 27 Juni 2018 pemilihan kepala daerah (pilkada) (KPU, 2018). Kemudian pada Rabu, 17 April 2019 dilakukan pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD (KPU, 2019). Terakhir di tengah pandemi Covid-19, tanggal 9 Desember 2020 untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota di 9 provinsi (KPU, 2020).

Setiap masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dikenal dengan istilah partisipasi politik, karena pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dapat mempengaruhi peraturan dan keputusan yang otoritatif (Deth, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat mempengaruhi hasil pemilu. Sumatera Barat menjadi satu diantara provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.

Tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia sebagai pemilih didominasi oleh perempuan. Data ini didapatkan dari KPU Nasional mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 yang menunjukkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 96.557.044 orang sedangkan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 orang (One, 2019). Tidak hanya saat ini, data pemilih pada tahun 2014 dan 2004 pun mayoritas adalah perempuan, meskipun saat itu kegiatan ini masih dianggap tidak terlalu penting bagi kalangan perempuan (Ismanto, 2004). Hal ini dikarenakan adanya berbagai pengaruh seperti usia dan tingkat pendidikan (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2012).

Hasil wawancara dilakukan pada sebuah kompleks perumahan, sebagian besar dari mereka melakukan pencoblosan pada pemilu tahun lalu. Dari 26 rumah dengan 61 pencoblos produktif, kebanyakan dari mereka berusia antara 25 tahun sampai 40 tahun dengan latar pendidikan yang berbeda dan kebanyakan diantara mereka adalah perempuan. Mereka mengatakan bahwa nilai satu suara sangat berguna sehingga mereka tetap memilih. Sedangkan beberapa warga disekitar perumahan tersebut yang rata-rata usianya diatas 40 sampai 60 tahun masih banyak yang tidak melakukan pencoblosan. Berbeda halnya di daerah lain, perempuan yang berada diatas 40 tahun mengatakan bahwa tidak ada alasan golput selama sehat jasmani dan masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Selain usia, yang dapat mempengaruhi partisipasi politik adalah status sosial seperti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang ditentukan oleh tingkat pendidikan (Kusmanto, 2013). Menurut Sundari dan Waluyati (2014) tingkat pendidikan berbanding lurus dengan partisipasi politik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Mulyawarman (2009) yang mengungkapkan bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi) memilih kepala desa dengan pertimbangan seperti pengalaman dan kelayakan kandidat, namun pemilih dengan tingkat pendidikan yang rendah memilih karena sekedar mengenal sosok kandidat tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang subjektif. Tak hanya itu, menurut Astuti, Afandi, dan Listuani (2014) mengungkapkan pendidikan juga menjadikan perempuan berkualitas sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi politik. Minimnya tingkat pendidikan dapat menurunkan angka partisipasi politik pada perempuan (Shvedova, 2005). Oleh karena itu, pendidikan dapat menentukan bagaimana peran perempuan sebagai pemilih. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik melihat perbedaan partisipasi politik pada perempuan ditinjau dari usia dan tingkat pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berjenis komparatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan cara menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik, dan menguji hipotesis sedangkan komparatif artinya membedakan satu atau lebih variabel pada sampel. Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah partisipasi politik.

Populasi penelitian adalah pemilih perempuan di Sumatera Barat. Sampel penelitian diambil sebanyak 180 orang pemilih perempuan yang telah terdaftar dalam pemilu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu siapa saja yang dijadikan sampel akan melalui pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2012). Jadi setiap sampel disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu memiliki KTP wilayah Sumatera Barat, mempunyai hak pilih, perempuan dan rentang usia yaitu remaja, dewasa, dan lanjut usia. Skala pada penelitian ini berbentuk Likert. Skala Likert merupakan skala yang berisikan pernyataan dan menunjukkan bagaimana sikap subjek (Prasetyo & Lina, 2008). Skala ini akan diberikan skor pada setiap responnya yang terdiri dari 4 macam yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS).

Tahap awal yang dilakukan adalah dengan uji coba (*tryout*) diberikan berupa angket kepada 7 orang perempuan guna untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas alat ukur pada penelitian ini ada dua macam yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi didapatkan dengan pengujian yang dilakukan oleh *professional*

judgement. Sedangkan validitas konstruk menggunakan ketentuan korelasi dengan nilai sebesar $r = 0,30$ (Azwar, 2008). Berdasarkan analisis dengan bantuan SPSS, *item* yang dapat digunakan sebanyak 39 item dari 43 item yang telah diuji coba dengan nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.847. Tahap kedua, setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, angket diberikan pada partisipan. Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk pengisian skala sebelum diisi agar partisipan memahami cara pengisian skala. Tahap ketiga, peneliti menganalisis data yang telah didapatkan dengan anava dua jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mendeskripsikan bagaimana perbedaan rerata empiris dengan hipotetis. Dari hasil menunjukkan bahwa partisipasi politik memiliki nilai rerata empiris lebih tinggi daripada nilai rerata hipotetis ($\mu_e = 99,32 > \mu_h = 78$). Artinya partisipasi politik pada pemilih perempuan lebih tinggi daripada populasi pada umumnya.

Perbedaan partisipasi politik pada subjek penelitian akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Masing-masing kategori memiliki rentang skor. Berikut adalah pengkategorian partisipasi politik.

Tabel 1. Rentang kategori skala Partisipasi Politik dan skor subjek

Rumus	Skor	Kategorisasi	Subjek	
			F (Σ)	%
$(\mu + 1,0 \sigma) \leq X$	$97,5 \leq X$	Tinggi	80	44,4
$(\mu - 1,0 \sigma) \leq X < (\mu + 1,0 \sigma)$	$58,5 \leq X < 97,5$	Sedang	100	55,6
$X < (\mu - 1,0 \sigma)$	$X < 58,5$	Rendah	0	0
Jumlah			180	100

Berdasarkan kategori skala partisipasi politik pemilih perempuan diatas, terdapat 80 orang berada pada kategori tinggi dan 100 orang berada pada kategori sedang. Namun tidak ada yang berada pada kategori rendah. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa subjek pada Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini memiliki skor partisipasi politik yang sedang ke tinggi.

Selanjutnya rerata aspek-aspek partisipasi politik pemilih perempuan dilihat berdasarkan kategori usia dan tingkat pendidikan. Pada kategori usia, remaja dalam aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 38,27. Kemudian pada aspek motif partisipasi didapatkan rata-rata 27,93 dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 32,42. Sedangkan pada rentang usia dewasa pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 40,03, pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 29,63 dan pada aspek konsekuensi berpartisipasi didapatkan rata-rata 33,63. Sekarang pada rentang lanjut usia pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 36,37, pada aspek motif partisipasi didapatkan rata-rata 26,97, dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 31,72. Pengkategorian usia berdasarkan aspek-aspek partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Skor Kategori Usia Per Masing-Masing Aspek Partisipasi Politik

Kategori	Aspek	Min	Max	Mean	SD
Remaja	Aspek 1	26	50	38,27	6,415
	Aspek 2	16	42	27,93	5,297
	Aspek 3	23	43	32,42	4,563
Dewasa	Aspek 1	32	50	40,03	4,639
	Aspek 2	21	38	29,63	4,415
	Aspek 3	20	44	33,63	5,168
Lansia	Aspek 1	25	50	36,37	6,263
	Aspek 2	19	41	26,97	5,012
	Aspek 3	21	43	31,72	5,734

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan berdasarkan aspek, gaya partisipasi mendapatkan rerata paling tinggi disusul oleh aspek konsekuensi partisipasi dan yang paling rendah pada aspek motif berpartisipasi, sedangkan rentang usia dewasa merupakan usia yang mendapatkan rerata partisipasi politik yang paling tinggi, dan diikuti oleh remaja sedangkan lanjut usia mendapatkan rerata terendah.

Pada tingkat pendidikan SMA dalam aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 38,64. Kemudian pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 28,67 dan pada aspek konsekuensi partisipasi didapatkan rata-rata 33,89. Sedangkan pada tingkat pendidikan sarjana pada aspek gaya partisipasi didapatkan rata-rata 37,38 kemudian pada aspek motif berpartisipasi didapatkan rata-rata 27,18, dan pada aspek konsekuensi berpartisipasi didapatkan rata-rata 30,98. Pengkategorian usia berdasarkan aspek-aspek partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Skor Kategori Pendidikan Per Masing-Masing Aspek Partisipasi Politik

Kategori	Aspek	Min	Max	Mean	SD
SMA	Aspek 1	25	50	38,64	6,150
	Aspek 2	16	42	28,67	5,199
	Aspek 3	21	43	33,89	4,777
Sarjana	Aspek 1	26	50	37,38	5,600
	Aspek 2	19	38	27,18	4,512
	Aspek 3	20	44	30,98	5,559

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada aspek gaya partisipasi mendapatkan rerata paling tinggi disusul oleh aspek konsekuensi partisipasi dan yang paling rendah pada aspek motif berpartisipasi. Sedangkan tingkat pendidikan SMA mendapatkan rerata partisipasi politik yang paling tinggi dan di ikuti oleh tingkat pendidikan sarjana.

Pengujian normalitas sebaran data penelitian menggunakan uji *Kolmogorov-Smornov Test*. Hasil uji normalitas pada partisipasi politik memiliki nilai p sebesar 0,200 ($p > 0,05$). Uji normalitas pada kategori usia yaitu remaja sebesar 0,200, dewasa sebesar 0,68, dan lansia sebesar 0,200. Kemudian uji normalitas pada tingkat pendidikan yaitu SMA dan sarjana sama yaitu sebesar 0,200. Secara keseluruhan data sudah berdistribusi normal.

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan model statistik *Levene statistic*. Pada variabel partisipasi politik berdasarkan usia diperoleh $p = 0,069$ ($p > 0,05$) dan berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh $p = 0,557$ ($p > 0,05$). Artinya, varian data bersifat homogen. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan teknik anava 2 jalur. Hasil perhitungan pada partisipasi politik pada kategori usia didapatkan F sebesar 5,586 dengan signifikansi berada diangka 0,004 ($p < 0,05$), dengan kata lain terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan pada rentang usia.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada partisipasi politik pada kategori pendidikan didapatkan F sebesar 5,240 dengan signifikansi berada diangka 0,23 ($p > 0,05$), dengan demikian tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan pada tingkat pendidikan. Kemudian uji interaksi antara usia dengan pendidikan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,05$) yang berarti terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi politik pada pemilih perempuan di Sumatera Barat dengan melihat rentang usia dan tingkat pendidikan. Hasil uji hipotesis penelitian terdapat perbedaan usia pada partisipasi politik pemilih perempuan di Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan laporan riset pemilu KPU 2019 di Provinsi Bali dimana didapatkan data yaitu jenis kelamin perempuan merupakan pemilih terbanyak dengan rentang usia muda (remaja dan dewasa).

Hasil uji hipotesis partisipasi politik berdasarkan tingkat pendidikan pada pemilih perempuan di Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya perbedaan. Hal ini bertentangan dengan teori-teori yang menyatakan jika pendidikan merupakan faktor yang akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Astuti, Afandi, dan Listuani (2014)

mengungkapkan bahwa pendidikan menjadikan perempuan berkualitas sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi politik. Minimnya tingkat pendidikan dapat menurunkan angka partisipasi politik pada perempuan (Shvedova, 2005). Selain itu, menurut Kusmanto (2013) warga yang berpendidikan tinggi biasanya lebih partisipatif.

Pendidikan tidak berpengaruh dalam partisipasi politik perempuan di Sumatera Barat dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan sosial, masih timpangnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia membuat pengaruh *money* politik dan pembagian sembako masih sangat tinggi dikalangan masyarakat, ini dibuktikan dengan aspek motif berpartisipasi mendapatkan skor yang paling rendah dalam penelitian ini. Menurut Tia (2014) tingkat partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang menjelang pemilu pilkada, terjadinya politik uang dikarenakan masyarakat mulai rasional dalam memandang partisipasi politik. Sedangkan Lia (2019) menemukan pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Heni (2019) generasi Z (17-21) tahun banyak melakukan partisipasi politik instrumental dari pada partisipasi strategis.

Permasalahan yang banyak terjadi saat ini dalam partisipasi politik warga negara Indonesia kebanyakan pemilih memilih bukan menggunakan analisis untuk memilih calon legislatif yang akan memimpin jika terpilih nanti, sehingga berimbas kepada terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten. Permasalahan kesejahteraan sosial juga menjadi faktor yang mendukung permainan *money* politik di Indonesia, walaupun tingkat partisipasi pemilih perempuan tinggi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat tapi tidak di iringi dengan pemanfaatan tingkat pendidikan sehingga banyak terjadi bias dalam perpolitikan Indonesia.

Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik. Remaja dengan kategori tingkat pendidikan SMA lebih aktif dalam aspek gaya berpartisipasi dalam politik tapi hasil lebih rendah di aspek konsekuensi dan motivasi dalam partisipasi politik, hal ini sesuai dengan beberapa teori psikologi perkembangan yang menyatakan jika remaja memiliki energi yang berlebih dan mempunyai keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Lalu pada remaja dengan kategori tingkat pendidikan sarjana pada aspek motivasi berpartisipasi lebih tinggi dari pada remaja dengan tingkat pendidikan SMA, dalam hal ini remaja dengan tingkat pendidikan sarjana sudah mulai mempertimbangkan alasan kenapa mereka ingin ikut dalam partisipasi politik di daerah mereka. Rentang umur dewasa dengan tingkat pendidikan SMA juga hampir sama dengan remaja di tingkat pendidikan yang sama, rentang umur dewasa juga aktif dalam gaya berpartisipasi politik hanya saja aspek konsekuensi dan aspek motif berpartisipasi pada pemilih dewasa lebih tinggi dari pada remaja dengan tingkat pendidikan SMA.

Pemilih dewasa dengan tingkat pendidikan sarjana pada aspek gaya berpartisipasi juga tinggi hanya saja dewasa pada tingkat pendidikan sarjana memiliki nilai lebih tinggi pada aspek motivasi berpartisipasi, ini menunjukkan jika dewasa dengan rentang pendidikan sarjana memiliki motif atau alasan yang lebih tinggi dalam berpartisipasi politik. Pada rentang umur lanjut usia pemilih wanita dalam partisipasi politik, pada setiap aspek pemilih lanjut usia baik dengan tingkat pendidikan SMA atau sarjana lebih rendah dibandingkan pemilih dengan rentang usia remaja dan dewasa, hal ini menunjukkan baik dalam aspek gaya berpartisipasi, motivasi berpartisipasi atau konsekuensi berpartisipasi emilih wanita dengan rentang usia lanjut usia lebih rendah dari ada rentang umur remaja dan dewasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Secara umum tingkat partisipasi politik pada pemilih perempuan tinggi di Sumatera Barat, Terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan ditinjau dari usia dalam pilgub Sumatera Barat 2020, Tidak terdapat perbedaan partisipasi politik pada pemilih perempuan ditinjau dari tingkat pendidikan dalam pilgub Sumatera Barat 2020, Terdapat interaksi kategori usia dengan pendidikan dalam keikutsertaan pemilih perempuan dalam partisipasi politik pilgub Sumatera Barat 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Afandi, M. A. & Listuani R. H. (2019). Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*. Surabaya: Cakrawala. Vol 13(2). Hal : 1 – 24
- Azwar, S. (2008). *Penyusunan skala psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismanto, I. (2004). *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi
- KPU RI. (Producer). (2018). *Sosialisasi Pilkada Serentak 2018*. Jakarta. (<https://www.youtube.com/watch?v=PTEYN4DTSuM>). Diakses 07 Juli 2020
- KPU RI. (2019). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019*. Jakarta
- KPU Sumatera Barat. (2020). *Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020*. Padang. (<https://www.instagram.com/p/CFhIGU7JWzR/?igshid=8cn5c2lgif3c>). Diakses 25 September 2020
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 1(1), 28 – 36.
- Mujani, S., Liddle, R.W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde*. Bandung: Mizan
- Mulyawarman. (2009). *Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: Universitas Riau - FISIP - Ilmu Pemerintahan
- One. (2019). *Daftar Lengkap DPT Pemilu 2019 Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pojoksatu.id. Diakses 10 Juli 2020 <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/02/03/daftar-lengkap-dpt-pemilu-2019-seluruh-indonesia/>
- Shvedova, N. (2005). Obstacles to Women's Participation In Parliament. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. No. 33. Hal: 22 – 45
- Subekti, Tia. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sundari, L., Alfiandra, A., & Waluyati, S. A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 1(1)
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Semula*. Yogyakarta: UGM Press
- Juliasih, L. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Voter Turn-Out dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Kabupaten Garut Tahun 2009 dan 2014). *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 2(1), 30-41.
- Van Deth, J. W. (2014). A Conceptual Map of Political Participation. *Acta Politica*, Vol 49(3) Hal: 349-367